

Komisi VIII DPR Minta 176 Lembaga Selewengkan Dana Mirip ACT Diaudit

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menyerahkan dokumen kepada Mensos terkait 176 lembaga serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mengaudit seluruh yayasan serupa ACT. "Belajar dari kasus ACT ini, pihak Kementerian Sosial juga diminta segera mengaudit lembaga-lembaga ini. Tidak hanya berkedok kegiatan agama tertentu, tetapi juga agama lainnya," kata Ace kepada wartawan, Kamis (4/8).

Ace meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap lembaga mana pun yang melakukan tindak pidana. Terlebih terhadap mereka yang melakukan penyelewengan bantuan berkedok filantropi.

"Pihak penegak hukum harus tegas kepada lembaga mana pun yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, dengan cara melakukan penyelewengan bantuan berkedok filantropi Islam," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.

Dengan demikian, Ace mendorong penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga tersebut. Ace mendesak

agar lembaga bermodus aktivitas filantropi oleh masyarakat kemudian diselewengkan di luar peruntukannya diurus.

"Kita harus menegakkan hukum atas lembaga-lembaga seperti itu. Modus menarik uang dari masyarakat dengan dalih bantuan bencana namun diselewengkan untuk kepentingan di luar peruntukannya harus diurus," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menyerahkan dua dokumen kepada Mensos. Salah satu dokumennya terkait 176 lembaga serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana.

Ivan menyebutkan pihaknya sudah menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk mendalami kasus yang serupa. Dia menjelaskan ke-176 lembaga baru ini memiliki modus yang sama dengan ACT.

"Kami nyatakan, ACT ini bukan satu-satunya. Jadi kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa, dan 176 tadi salah satu di antaranya yang kemungkinan (melakukan penyelewengan dana), kami sudah serahkan ke penegak hukum," kata Ivan kepada wartawan di gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (4/8). ● dot

2 Polhukam

FOTO: ANT



OPERASI PENDARATAN SUPER GARUDA SHIELD 2022

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) bersama prajurit Korps Marinir TNI AL dan Prajurit Marinir US melakukan penyerangan terhadap musuh saat operasi pendaratan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir di Pantai Todak, Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8). Operasi pendaratan tersebut merupakan bagian Latihan Bersama Super Garuda Shield 2022 guna mempererat hubungan bilateral antar negara sekaligus berbagi ilmu tentang taktik pertempuran khususnya antara pasukan Marinir TNI AL dan pasukan Marinir AS.

Setjen DPR Minta Puspanlak Libatkan Tenaga Ahli AKD di Uji Materi UU

Suprihartiningsih mengatakan, sinergi antara Puspanlak dan tenaga ahli di AKD terkait basis data dalam uji materi undang-undang itu penting agar data yang dihasilkan mudah diperoleh dan diakses oleh staf serta tenaga ahli AKD dalam memberikan dukungan kepada anggota dewan dalam menjalankan tiga fungsinya, yaitu sebagai pembentuk undang-undang, pengawas pemerintahan, dan fungsi anggaran.

JAKARTA (IM) - Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartiningsih meminta Pusat Pemantauan Pelaksanaan

(Puspanlak) Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI agar melibatkan tenaga ahli alat kelengkapan dewan (AKD) dalam uji materi undang-un-

darang. Menurut Supri, pelibatan tenaga ahli AKD itu dapat dilakukan oleh Puspanlak, khususnya dalam berkoordinasi dan bersinergi memberikan data ketika menguji materi undang-undang.

"Terkait dengan program atau kegiatan judicial review (uji materi) yang dilaksanakan di Puspanlak ini, karena proses tersebut melibatkan teman-teman di AKD, khususnya pada tahapan menyiapkan keterangan DPR atas pengajuan yang diajukan masyarakat, saya menilai pelaksanaan kegiatan Puspanlak sudah dilakukan secara baik. Namun, yang perlu ditingkatkan lagi adalah koordinasi dan sinergi dengan teman-teman di AKD, khususnya dalam memberikan data,"

ujar Supri dalam keterangan tertulis di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (4/8).

Hal itu dia sampaikan usai mengisi sesi pertama Diskusi Kelompok Terpumpun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI bertema Peningkatan Kolaborasi Puspanlak UU dengan Komponen Alat Kelengkapan Dewan melalui Inovasi Penggunaan IT dan Peningkatan Koordinasi dan Integrasi Kegiatan, di Jakarta, Rabu (3/8).

Supri menambahkan sinergi antara Puspanlak dan tenaga ahli di AKD terkait basis data dalam uji materi undang-undang itu penting agar data yang dihasilkan mudah diperoleh dan diakses oleh staf serta tenaga ahli AKD dalam memberikan dukungan kepada anggota dewan dalam menjalankan tiga fungsinya, yaitu sebagai pembentuk undang-undang, pengawas pemerintah, dan fungsi anggaran.

Ia menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi Biro Persidangan I dalam berkoordinasi dengan Puspanlak, yaitu belum adanya sistem terintegrasi yang di dalamnya terdapat seluruh data.

"Kami menilai memang perlu satu sistem terintegrasi data yang memang sedang

di bangun oleh Badan Keahlian menjadi satu data. Mudah-mudahan, program ini dapat terwujud sehingga dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kami dan teman-teman di AKD, khususnya dalam memberikan dukungan kepada dewan dalam pelaksanaan tiga fungsi dewan," jelas Supri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puspanlak Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tanti Sumartini mengatakan di antara seluruh pusat yang dimiliki Badan Keahlian DPR RI, Puspanlak adalah pihak yang belum terlalu banyak memunculkan hasil kerja.

Hal itu, lanjut dia, dikarenakan Puspanlak merupakan pusat pemantau pelaksanaan undang-undang yang tidak memiliki siklus pengawasan. "Yang ada adalah pengawasan yang dilakukan melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Tapi, kami itu kan tidak diikutkan. Sering kali itulah yang membuat standar itu. Ya sudahlah, kami beri bentuk-bentuk hasil kajian kami, hasil pantauan setiap tahun terhadap peraturan perundang-undangan kepada seluruh alat kelengkapan dewan sehingga bisa dipakai untuk melaksanakan fungsi pengawasan ataupun fungsi legislasinya," lanjut Tanti. ● osm



FOTO: ANT

INSTALASI SENI TERPENJARA DALAM UU MINERBA

Sebuah instalasi seni dari Gerakan #BersihIndonesia terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/8). Instalasi seni tersebut merupakan sebuah pesan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah harapan terakhir bagi perjuangan warga yang menjadi korban UU Minerba untuk mendapatkan keadilan hukum.

Panglima TNI Dukung Keterlibatan Personel Majukan Pendidikan

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mendukung keterlibatan personel TNI dalam memajukan pendidikan Indonesia di berbagai daerah, termasuk daerah yang tertinggal, terdepan, terluar atau daerah yang sedang dalam konflik.

"Kalau pendidikan, saya akan dukung penuh keterlibatan personel TNI," kata Andika Perkasa yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, seperti dilansir dari Antara Kamis (4/8).

Ia mengungkapkan bahwa institusi TNI sudah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan.

Oleh karena itu, ketika pihak Universitas Pertamina menemui Andika dan membahas terkait pengajuan kerja sama antara Universitas Pertamina dengan TNI, Andika menerima dengan tangan terbuka untuk beberapa program yang diajukan Universitas Pertamina.

Salah satu dari program yang diajukan adalah Beasiswa Ujung Negeri. Beasiswa ini akan diberikan kepada putra atau putri

daerah yang berprestasi. Selain itu, juga terdapat beasiswa untuk putra atau putri personel TNI yang berprestasi. "Segera kita (TNI dan Universitas Pertamina) susun perencanaan kerja sama Beasiswa Ujung Negeri ini," kata Andika.

Bagi Andika, pendidikan adalah jendela utama untuk melihat dunia dan mengubah masa depan untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, ia akan melibatkan personel TNI yang berada di seluruh Indonesia untuk membantu dan menyosialisasikan program beasiswa ini guna memajukan pendidikan bangsa.

"Nanti kami akan kirim ke semua (personel), termasuk ke mereka yang sedang bertugas di daerah yang tertinggal, terluar, atau yang sedang dalam konflik. Nanti (Universitas Pertamina) bikin video pendek, ya," kata Andika.

Lebih lanjut, Andika memandang bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi setiap individu sehingga sangat disayangkan jika terlewatkan. ● vit



FOTO: ANT

PENYERAHAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIREHABILITASI

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati (kedua kiri) melepas borgol dari tangan tersangka penyalahguna narkotika berinisial P (kedua kanan) di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Napza Mitra Adhyaksa Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/8). Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghentikan penuntutan terhadap tersangka tersebut secara keadilan restoratif atau 'restorative justice' dengan melalui berbagai penilaian dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadapnya.

Dua Terdakwa Pemalsuan Surat TGM Divonis 3 Tahun

PALANGKARAYA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa HM Mahyudin dan Wang Xie Juan alias Susi yang terjatir perkara pemalsuan surat dengan pidana penjara, masing-masing 3 tahun penjara.

Putusan Majelis Hakim yang diketuai Irfanul Hakim serta didampingi oleh Yudi Eka Putra dan Hotma Edison Parliindungan Sihatputra selaku hakim anggota tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HM Mahyudin selama tiga tahun penjara," ucap Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan pada sidang yang berlangsung di PN Palangka Raya, Senin (1/8).

Perbuatan kedua terdakwa yang menjadi pertimbangan memberatkan putusan hakim yakni merugikan korban yakni dari PT. Tuah Globe Mining

(TGM). Sedangkan yang meringankan yakni terdakwa tidak pernah dihukum.

Atas putusan tersebut, Anwar Sanusi selaku Penasihat Hukum bersama terdakwa (Mahyudin) langsung mengambil langkah banding dengan mendaftar ke PTSP PN Palangka Raya. "Kita banding atas putusan Majelis Hakim ini, dan sudah kita daftar ke PTSP," ungkapnya kepada awak media.

Diakuinya, atas putusan tersebut pihaknya sesalkan, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang penting, seperti terkait RUPS, AHU dan bukti lainnya yang sudah disampaikan secara gamblang di persidangan.

Sama dengan HM Mahyudin, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun terhadap terdakwa Wang Xie Juan alias Susi.

"Menyatakan terdakwa Wang Xie Juan alias Susi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun," kata Majelis Hakim saat menyampaikan amar putusan.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, Alfin Suherman selaku penasihat hukum terdakwa (Susi) menyatakan banding. "Kita tetap menghormati apapun yang sudah diputus oleh Majelis Hakim. Kami Penasihat Hukum Wang Xie Juan atau ibu Susi ini mengajukan banding," tukasnya.

Sebelumnya, dalam tuntutan JPU, mantan Direktur PT Tuah Globe Mining (PT TGM) HM Mahyudin dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kemudian, dalam tuntutan JPU, Direktur PT Kutama Mining Indonesia (PT KMI) Wang Xie Juan alias Susi dituntut pidana selama 5 tahun 6 bulan.

JPU menyatakan terdakwa telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan yang menimbulkan kerugian sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP. ● lus

Wakil Ketua MPR Puji Kehadiran Vaksin Covid-19 Buatan BUMN

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi kehadiran vaksin Covid-19 produksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu patut diapresiasi karena vaksin tersebut merupakan wujud dari kreativitas anak bangsa untuk mendorong kemandirian negara.

"Upaya untuk terus mendorong kreativitas anak bangsa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri patut diapresiasi di tengah ancaman pandemi dan krisis global yang belum berakhir," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (4/8).

Menurutnya, kehadiran vaksin tersebut bisa menjadi momentum bagi semua pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam membangkitkan potensi anak bangsa. Sehingga sejumlah permasalahan saat ini atau yang akan datang di masa depan bisa diatasi.

"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk seluas-luasnya memanfaatkan potensi yang dimiliki anak bangsa untuk membangun kemandirian," katanya.

Ia menjelaskan kemandirian tidak berarti sebagai benar-benar mandiri dalam segala bidang. Sebab sejatinya, tidak ada satu bangsa yang bisa hidup sendiri di dunia tanpa terkait dengan negara lain. Namun kemandirian bisa dimulai dari cara membangun kepercayaan diri dan optimisme anak bangsa dalam menjawab setiap tantangan yang bakal dihadapi.

"Berbagai upaya untuk membangun optimisme anak bangsa merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan dalam setiap upaya bangsa ini mengatasi dampak krisis global yang kita hadapi," tutupnya. ● osm

TRANSRETAIL

PT ALFA RETAILINDO
("Perseroan")

PANGGLILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan bersama ini mengundang pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan,
Gedung Transmart Lebak Bulus Lantai 2,
Jl. Lebak Bulus Raya No.8, Jakarta Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

- Perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
 - Lain-lain.
- Catatan:
- Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat ditunjuk sebagai kuasa, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 - Salinan surat kuasa harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal Rapat.
 - Salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum masa tersebut hadir dalam Rapat.
 - Demi terselenggaranya Rapat secara efisien dan teratur, kuasa Pemegang saham diminta hadir di tempat Rapat tiga puluh (30) menit sebelum Rapat dimulai.
 - Seluruh bahan terkait agenda Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini dan akan tetap tersedia sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Jakarta, 5 Agustus 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan";
- Perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang semula tidak ada menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan"; dan
- Perubahan ketentuan Saldo Minimum Pengalihan Investasi yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh pada Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 5 Agustus 2022

Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana